



# LAWCUS

April  
2025

Legal Essay Book

5th  
Edition!

## **MENINJAU 100 HARI KEPEMIMPINAN KABINET MERAH PUTIH DALAM MEREKONSTRUKSI INDONESIA**

DEPARTMENT OF WRITING  
SKILL 2024/2025

CAKRA NIRVANA  
LAW INTELLECTUAL SOCIETY  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# **Lawcus Legal Essay Book 5th Edition 2025**

DITERBITKAN OLEH

Department of Writing Skill Lawcus FH Unsri  
(departementofwritingskill@gmail.com)

PIC (Person in Charge) of LLEB 2025 5th Edition: Saskia Namira A. (Genius 9)

EDITOR: Indah Denisa Apriani (Genius 9)

Alysa Monica Glaresta (Genius 9)

Rayya Tsabita Ameera (Genius 9)

TANGGAL TERBIT

28 April 2025

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dan menghadirkan Lawcus Legal Essay Book (LLEB) 5th Edition yang merupakan satu program kerja dari Department of Writing Skill Lawcus FH Unsri periode 2024/2025. Edisi ini, yang mengangkat tema "Meninjau 100 Hari Kepemimpinan Kabinet Merah Putih dalam Merekonstruksi Indonesia", menjadi refleksi awal terhadap arah pembangunan nasional pasca terpilihnya pemerintahan baru.

Tema "Meninjau 100 Hari Kepemimpinan Kabinet Merah Putih dalam Merekonstruksi Indonesia" dipilih berdasarkan relevansi dan urgensi terhadap dinamika politik nasional saat ini. 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana janji kampanye diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, serta mengukur orientasi pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat dalam rangka menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui esai-esai dalam buku ini, kami berupaya menyediakan ruang bagi para mahasiswa untuk menuangkan gagasan, mengasah ketajaman berpikir, serta mengambil bagian dalam wacana akademik mengenai kepemimpinan nasional. Tidak hanya sebagai catatan akademik, karya-karya dalam buku ini diharapkan mampu menjadi pijakan awal untuk membangun intelektual yang kritis dan bertanggung jawab.

Proses penyusunan Lawcus Legal Essay Book (LLEB) 5th Edition tentunya diwarnai oleh berbagai tantangan. Namun, berkat kerja sama yang solid dari seluruh tim dan dukungan berbagai pihak, tantangan tersebut dapat teratasi. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis atas dedikasi, waktu, dan pemikirannya dalam menghasilkan karya-karya berkualitas. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penerbitan buku ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga Lawcus Legal Essay Book (LLEB) 5th Edition ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat, terutama bagi mereka yang tertarik untuk memperdalam isu-isu kepemimpinan nasional, pembangunan hukum, dan integritas bangsa Indonesia. Semoga upaya kecil ini menjadi bagian dari kontribusi positif untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

# 100 Hari Kabinet Merah Putih: Membangun Kepercayaan Atau Menguji Kesabaran Publik?

Alsya Monica Glaresta  
02011182429036  
Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming priode 2024-2029 menjadi sorotan publik sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Salah satu alasan utamanya adalah “kabinet gemuk”, dengan jumlah posisi dalam kementerian dan lembaga yang jauh lebih besar dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya. Kabinet ini terdiri dari 48 menteri dan 55 wakil Menteri, serta 5 pejabat setingkat Menteri, sehingga total pejabat yang terlibat mencapai 108 orang[1]. Dalam 100 hari pertama, berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan baru ini. Namun, kebijakan yang diambil memunculkan banyak perdebatan dikalangan masyarakat mengenai efektifitas program-program yang dijalankan. Sebagian pihak melihat bahwa kebijakan ini merupakan langkah awal dalam merealisasikan janji kampanye, sementara yang lain justru mempertanyakan apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran atau hanya sebagai citra politik belaka.

Periode 100 hari pertama sering dianggap sebagai tolak ukur awal bagi masyarakat dalam menilai arah kepemimpinan yang baru. ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai cukup tinggi, terutama setelah kampanyenya yang menekankan keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan program unggulan seperti makan siang gratis (MSG). Masyarakat berharap pemerintahan ini akan membawa sebuah langkah baru dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam 100 hari pertama menjadi aspek yang krusial untuk dianalisis.

## B. PEMBAHASAN

Sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap Kabinet Merah Putih, kebijakan yang diambil dalam 100 hari pertama menjadi tolak ukur arah pemerintahan yang baru. Hal ini tidak lepas dari opini

publik, terutama terkait struktur kabinet yang dinilai teralalu besar dan beberapa kebijakan yang realisasinya menuai pro dan kontra di tengah publik. Sejak awal pembentukannya, kabinet baru ini telah menarik perhatian publik. Tujuan utama dibentuknya kabinet gemuk ini untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi kebijakan. Namun, di lain sisi, muncul kritik bahwa kabinet yang terlalu besar dapat membebani anggaran negara secara signifikan karena setiap kementerian membutuhkan sarana, prasarana, dan anggaran tersendiri. Menurut *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS), kabinet baru dapat menghabiskan anggaran negara hingga Rp777 miliar per tahun untuk gaji operasional menteri dan wakil menteri. Selain itu, pelaksanaannya dinilai kurang efektif dikarenakan koordinasi antar kementerian menjadi lambat akibat banyaknya suara yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta banyaknya tumpang tindih wewenang dalam lembaga kementerian yang juga memperlambat implementasi kebijakan negara[2]. Kritik ini pun menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, apakah kabinet besar ini mampu menghasilkan hasil yang sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu melihat lebih jauh terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sejak 100 hari pertama kepemimpinan. Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan masyarakat antara lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi anggaran.

Program MSBG merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang dirancang sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak serta menurunkan angka stunting di Indonesia. Meskipun program ini memberikan banyak manfaat namun memunculkan kekhawatiran dari kalangan masyarakat mengenai anggaran yang digunakan. Pada tahun pertama, anggaran yang digunakan dalam merealisasikan program ini mencapai Rp100 triliun dan

[1] Tempo, Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri, 21 Oktober 2024, diakses 4 April 2025.

[2] Tempo, "Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Akan Habiskan 777 Miliar Per Tahun Hanya Untuk Gaji dan Tunjangan," October 18, 2024.

berpotensi mencapai Rp460 triliun pada tahun 2029. Jika dibandingkan dengan belanja negara yang dianggarkan sebanyak Rp3.613,1 triliun, anggaran MSBG ini memang tidak terlalu besar [3]. Namun, masyarakat tetap merasa bahwa program ini tidak teralisasi dengan baik di lapangan. Misalnya, beberapa siswa yang tidak kebagian susu, lauk yang semakin berkurang, bahkan rasanya yang kurang enak. Apalagi program ini dijalankan pada setiap sekolah yang ada.

Publik berasumsi bahwa program ini kurang tepat sasaran karena sekolah elit juga menerima program ini. Selain itu, masyarakat menjadi skeptis apakah anggaran program ini tersalurkan dengan benar tanpa adanya anggaran yang disalahgunakan. Padahal, anggaran yang digunakan untuk merealisasikan program ini dapat digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih penting seperti investasi pada pendidikan dan pembangunan. Jangankan mencicipi makan siang gratis, banyak daerah pedalaman yang bahkan belum mendapatkan pendidikan. Adapula, perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan akses pendidikan seperti anak usia sekolah dasar di daerah Cijuhung. Mereka harus menyeberangi waduk dengan perahu, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki melintasi hutan menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh. Banyaknya masyarakat yang unjuk rasa terkait hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam keberhasilan program ini [4]. Program ini dianggap hanya sebagai citra publik belaka demi mewujudkan janji kampanye. Masyarakat merasa bahwa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pemerataan akses pendidikan dan pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal, barulah program ini dapat dijalankan.

Dalam merealisasikan Program unggulan MSBG, presiden prabowo mengeluarkan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres 1/2025). Hal ini menyebabkan keriuhan di kalangan karena dianggap sebagai langkah yang terburu-buru. Padahal, disamping pemotongan anggaran untuk menghemat pengeluaran ini, pemerintahan Prabowo-Gibran justru membentuk “kabinet gemuk” [5]. Keputusan untuk tetap mempertahankan “kabinet gemuk” di Tengah narasi efisiensi anggaran dianggap tidak konsisten. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin menurun, dikarenakan pengangkatan Dedy Corbuzier

sebagai staf khusus (stafsus) bidang Komunikasi Sosial dan Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dinilai tidak penting saat timing efisiensi anggaran ini. Kemenhan sendiri adalah salah satu kementerian yang tidak terdampak efisiensi, yang mana justru kontraproduktif dengan kementerian yang dinilai memiliki peran penting dalam masyarakat seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang anggarannya dipangkas senilai Rp8 triliun. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tidak lepas dari pemangkasan anggaran ini. Hal ini menyebabkan, banyaknya tenaga kerja yang diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Bahkan, Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Aceh Tengah terancam tidak menerima gaji hingga beberapa bulan setelah efisiensi ini[6]. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, kebijakan yang dijalankan pemerintah justru memperkuat skeptisisme masyarakat terhadap pemerintah. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah kabinet ini dapat membawa perubahan seperti yang dijanjikan saat kampanye, atau justru terjebak pada pola politik lama yang menekan hak berpendapat dan melindungi kepentingan elite.

Berdasarkan data CELIOS, 2025, evaluasi kinerja Presiden Prabowo selama 100 hari pertama mendapatkan nilai 5 dari 10. Sedangkan penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan rapor nilai 3 dari 10. Hanya 4 responden yang memberikan nilai 7 dan tidak ada yang memberikan nilai memuaskan yaitu 8-10. Secara keseluruhan evaluasi terhadap kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama dinilai mengecewakan. Hal ini dapat terlihat dari 7% responden menilai “sangat buruk” dan 42% menilai “buruk”, 42% responden menilai “cukup” dan hanya 8% yang menilai “baik”[7]. Data ini mencerminkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintahan dalam 100 hari pertama. Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih belum mampu memenuhi ekspektasi Sebagian besar masyarakat.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertamanya masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun kepercayaan publik. Struktur pemerintahan yang besar

[3] A. A. Yolanda, *Anggaran Makan Bergizi Gratis: Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan APBN*, 1

[4] W. T. Aji, "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?" *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2025): 219.

[5] Indonesia Corruption Watch, "Kebijakan Pemangkasan Anggaran: Hemat untuk Rakyat atau Dana untuk Aparat?" (February 12, 2025), 1.

[6] Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), "Sesat Arah Efisiensi Anggaran," Press release, SEKNAS FITRA, February 12, 2025

[7] M. W. Askar et al., *Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran (CELIOS, 2025)*, 5-6

menjadi sorotan karena dinilai membebani anggaran negara tanpa memberikan efektivitas yang nyata dalam menjalankan kebijakan negara. Selain itu, kebijakan utama seperti MSBG menimbulkan perdebatan terkait efisiensi dan keberlanjutannya. Langkah yang dilakukan pemerintah menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan mengalami penurunan.

## 2. Saran

Pemerintahan harus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan transparan. Selain itu, pemerintahan perlu lebih responsive terhadap kritik masyarakat dengan membuka ruang diskusi secara luas sebelum mengambil keputusan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi juga perlu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 300-311.
- Askar, M. W., Adhinegara, B. Y., Muhammad, G. D., Fikri, B., Darmawan, J., & Saleh, M. (2025). *Rapor 100 hari Prabowo-Gibran: Evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih dan program ekonomi, energi, lingkungan hidup serta penegakan hukum*. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/01/Rapor-100-Hari-Prabowo-Gibran-Fx-2025.pdf>
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (2025, Februari 12). Sesat arah efisiensi anggaran [Press release]. SEKNAS FITRA.
- Indonesia Corruption Watch. (2025, February 12). Kebijakan pemangkasan anggaran: Hemat untuk rakyat atau dana untuk aparat? [https://WWW.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2025-02-12\\_icw-laporan-efisiensi-anggaran\\_0.pdf](https://WWW.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2025-02-12_icw-laporan-efisiensi-anggaran_0.pdf)
- Tempo. (2024, October 18). Ekonom sebut kabinet gemuk Prabowo akan habiskan 777 miliar per tahun hanya untuk gaji dan tunjangan. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-sebut-kabinet-gemuk-prabowo-akan-habiskan-777-miliar-per-tahun-hanya-untuk-gaji-dan-tunjangan-419068>
- Tempo. (2024, Oktober 21). Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-kabinet-prabowo-7-menko-41-menteri-55-wamen-dan-5-pejabat-setingkat-menteri-769327>
- Yolanda, A. A. Anggaran makan bergizi gratis: Tantangan dan peluang dalam pengelolaan APB

# Transformasi Pendidikan Indonesia: Meninjau Kebijakan Pendidikan Kabinet Merah Putih Dalam 100 Hari Pertama

Siti Rohmawati  
02011182429077  
Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan suatu negara, termasuk Indonesia. Sektor pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, sektor pendidikan Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah yang cukup besar. Salah satunya adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tingkat penyelesaian pendidikan SMA di perkotaan tercatat sebesar 74,17%, sementara di pedesaan hanya 53,85%, dengan selisih mencapai 20,32%. Kondisi ini memperburuk ketimpangan pendidikan, di mana banyak daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak dan akses terhadap teknologi. (BPS, 2021). Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini berdampak pada rendahnya angka kelulusan serta kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mengeluarkan sejumlah kebijakan penting terkait sektor pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk merespons tantangan yang ada dengan kebijakan yang lebih tepat dan terarah. Salah satu langkah penting adalah pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian yang lebih fokus, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud. (Mardiana, 2024).

Di sisi lain, kebijakan Makan Siang Gratis (MBG) juga menarik perhatian publik. Meskipun kebijakan ini menuai kontroversi dalam pelaksanaannya, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan generasi muda[1]. Dan Pengembalian Ujian Nasional (UN) yang sempat dihentikan pada 2020 akibat pandemi COVID-19 banyak menuai perdebatan public. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengevaluasi dampaknya terhadap sistem pendidikan Indonesia[2].

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan ketimpangan pendidikan dapat diminimalisir, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih inklusif, berkualitas. Esai ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam sektor pendidikan selama 100 hari pertama pemerintahannya.

## B. PEMBAHASAN

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, hal ini tercermin dengan jelas dalam Pasal 31 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [3]. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kebijakan di bidang pendidikan telah diperkenalkan. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup:

[1] Putra, A. (2024). Pentingnya Program Peningkatan Gizi bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 30(4), 237-246.

[2] Yunus, H. (2024). Reformasi Pendidikan Indonesia: Pembagian Kementerian Pendidikan dan Dampaknya pada Pengelolaan Pendidikan Nasional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(3), 225-238.

[3] UUD 1945. (1945). Pasal 31. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara.

## 1. Pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian yang lebih terfokus, merupakan salah satu kebijakan utama yang diperkenalkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengelola sektor pendidikan yang luas dan beragam dengan cara yang lebih efektif dan efisien, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sektor pendidikan di Indonesia[4].

Dari sudut pandang hukum, pemecahan kementerian ini sah dan sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pasal 17 UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk membentuk kementerian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan[5]. Langkah pemecahan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang memungkinkan pembentukan kementerian baru jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan[6].

Pemisahan kementerian ini sangat penting dilakukan karena pendidikan dan riset/teknologi merupakan dua sektor yang memerlukan perhatian khusus dan fokus. Sebelumnya, ketika kedua sektor ini digabung dalam satu kementerian, pembagian perhatian menjadi kurang optimal. Dengan pemisahan ini, Kementerian Pendidikan dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja dan teknologi. Sementara itu, Kementerian Riset dan Teknologi akan lebih maksimal dalam mendorong kemajuan riset, terutama di bidang teknologi yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada peran sistem koordinasi yang baik antar kementerian yang baru dibentuk, agar tidak muncul kebijakan yang saling bertentangan.

## 2. Program Makan Siang Gratis (MBG)

Program Makan Siang Gratis (MBG), yang diluncurkan untuk mengatasi masalah gizi buruk,

terutama di kalangan anak-anak sekolah, merupakan kebijakan yang sangat relevan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dapat mengakses makanan bergizi yang mendukung proses belajar mereka.

Dari sudut pandang hukum, program MBG ini merupakan penerapan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi[7]. Selain itu Indonesia juga terikat oleh berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (CRC), yang mewajibkan negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, termasuk pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas makanan bergizi[8].

Program makan siang gratis merupakan langkah yang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam pendidikan. Banyak anak-anak di daerah miskin yang kesulitan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan di sekolah, sehingga sering kali absen atau bahkan putus sekolah. Dengan adanya program makan siang gratis, anak-anak tersebut tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasar mereka dan merasa lebih dihargai.

Namun, perlu ditekankan bahwa program makan siang gratis tidak cukup. Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendidikan, Tanpa peningkatan kualitas pengajaran, pembenahan fasilitas, serta peningkatan keterampilan para guru, kebijakan ini tidak akan memberikan dampak yang maksimal.

## 3. Pengembalian Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional (UN), yang sempat dihentikan pada 2020 akibat pandemi COVID-19, kini kembali diberlakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Kembalinya UN bertujuan untuk memastikan bahwa ujian tetap berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kompetensi siswa,

[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Jakarta: Kemendikbudristek.

[5] UUD 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 17. Sekretariat Negara.

[6] UU No. 39 Tahun 2008: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2008). Sekretariat Negara.

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 28H ayat (1).

[8] United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC). Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/professional-interest/convention-rights-child>

serta memberikan standar evaluasi yang jelas terkait kualitas pendidikan di Indonesia[9].

Dari sudut pandang hukum, kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur pelaksanaan ujian untuk menilai kompetensi dan menekankan pentingnya evaluasi pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia[10].

Kembali Ujian Nasional (UN) dapat menjadi langkah yang positif untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih terstandarisasi dan objektif. Sebelumnya, ketika UN dihapuskan, timbul kekhawatiran bahwa penilaian terhadap siswa menjadi kurang terstruktur. Dengan penerapan kembali UN, pemerintah dapat menetapkan standar yang lebih jelas mengenai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. UN tidak hanya berfungsi sebagai syarat kelulusan, tetapi juga sebagai alat untuk menilai kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Tetapi UN seharusnya tidak menjadi satu-satunya acuan kelulusan. Evaluasi pendidikan harus dilakukan secara holistik, tidak hanya pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis, sikap, dan kemampuan sosial siswa.

### C. PENUTUP

Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia. Pemecahan kementerian, program Makan Siang Gratis, dan pengembalian Ujian Nasional adalah langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum, namun pelaksanaannya perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan semua pihak yang terkait. kebijakan-kebijakan tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan Indonesia, asalkan didukung oleh pengelolaan yang baik, transparansi, serta evaluasi yang rutin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia bisa lebih inklusif, merata, dan berkualitas, serta mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan global.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Tingkat penyelesaian pendidikan menurut daerah dan jenis kelamin: Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Mardiana, D. (2024). Pemecahan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sektor pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 45-58.
- Putra, A. (2024). Pentingnya Program Peningkatan Gizi bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 30(4), 237-246.
- Yunus, H. (2024). Reformasi Pendidikan Indonesia: Pembagian Kementerian Pendidikan dan Dampaknya pada Pengelolaan Pendidikan Nasional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(3), 225-238.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Jakarta: Kemendikbudristek.
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC). Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/professional-interest/convention-rights-child>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Pemberhentian Ujian Nasional 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

[9] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Pemberhentian Ujian Nasional 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

**Undang-Undang**

UUD 1945. (1945). Pasal 31. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentang Pendidikan.

UUD 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 17. Sekretariat Negara.

UU No. 39 Tahun 2008: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 28H ayat (1). Tentang Hak Warga Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.





Daftar rapor hijau menteri Kabinet Prabowo-Gibran berdasarkan studi Celios. (Istimewa)

Pencapaian 100 hari kabinet merah putih. **Pertama**, Penghapusan Utang UMKM, Kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Yang **Kedua**, Penyelenggaraan Pilkada Serentak, pada Rabu, 27 November 2024 bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. **Ketiga**, Kenaikan Upah Minimum Nasional, dalam sector ketenagakerjaan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kemudian **Keempat**, Makan Bergizi Gratis, melaksanakan janji kepada masyarakat, di awal tahun 2025 pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) secara bertahap. **Kelima**, Penurunan Biaya Haji, Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89,4 juta atau turun sekitar Rp4 juta dibanding rerata BPIH tahun 2024. **Keenam**, Kenaikan HPP & Penghentian Impor Beras. Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 dan jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga memutuskan untuk menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan tersebut[6].

Seperti yang kita lihat 100 hari kinerja Prabowo-Gibran ini telah mendapatkan pencapaian. Namun, tidak dipungkiri pula dalam kinerja ini banyak polemic yang terjadi.

Berikut ini polemic 100 hari kinerja kabinet merah putih. **Pertama**, Kinerja Menteri dan Kementerian, beberapa menteri tercatat dengan nilai rendah Penurunan

kualitas komunikasi antar kementerian dan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan menjadi masalah utama yang menghambat efektivitas pemerintahan. **Kedua**, Masalah Janji Politik dan Capaian Program. Dimana banyak yang menilai bahwa janji politik pemerintah baru hanya berhasil sebagian, sementara yang lainnya belum terlaksana. Capaian program kerja dinilai kurang optimal, dimana program-program yang dicanangkan tidak cukup memenuhi harapan masyarakat. **Ketiga**, Tata Kelola Anggaran yang Buruk Tata kelola anggaran pemerintahan juga menjadi sorotan utama. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam manajemen anggaran yang dapat berdampak pada efektivitas program-program pemerintah. **Keempat**, Tantangan Kolaborasi Antar Lembaga dan Sektor Ekonomi. Dimana masyarakat menilai kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat tidak efektif. Selain itu, sektor ekonomi tercatat belum mendapat intervensi yang cukup. Ini menjadi sorotan, terutama mengingat penurunan IHSG dan peningkatan PHK di sektor-sektor karya padat. **Kelima**, Tantangan Sektor Energi dan Lingkungan Hidup Dalam sektor energi, Menteri ESDM dinilai kurang tegas dalam mengambil langkah terkait penguatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada tahun 2025, meskipun Presiden Prabowo sudah menyatakan komitmen pada forum G20 Brasil. Selain itu, kebijakan terkait produksi nikel yang berlebihan dan rencana pembangunan smelter juga menjadi sorotan, dimana kebijakan yang ada belum cukup untuk melindungi harga nikel di pasar internasional. **Keenam**, Kinerja Polri dan TNI, tantangan dalam reformasi TNI dan Polri juga mencuat, dengan masyarakat menuntut transparansi dan profesionalisme lebih tinggi dari kedua institusi ini. Hal ini menjadi perhatian mengingat adanya agresivitas aparat dan pengungkapan koruptor yang mendapat penolakan publik[7].

Dalam setiap permasalahan diperlukan solusi. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan langkah-langkah strategis. Komunikasi antar kementerian harus diperkuat melalui koordinasi rutin dan pengawasan independen, sementara transparansi kebijakan ditingkatkan agar masyarakat memahami arah pemerintahan. Janji politik perlu direalisasikan dengan roadmap yang jelas, evaluasi masyarakat, dan indikator keberhasilan yang terukur.

[6] Humas, "Catatan 100 Hari Kabinet Merah Putih, Langkah Awal Menuju Perubahan Besar," 2025, <https://setkab.go.id/catatan-100-hari-kabinet-merah-putih/>.

[7] "Laporan 100 Hari Kabinet Prabowo- Gibran: Kinerja, Tantangan, Dan Harapan," celios, 2025, <https://celios.co.id/100-day-report-of-the-prabowo-gibran-cabinet-performance-challenges-and-expectations/>.

Tata kelola anggaran harus lebih transparan dengan pengawasan ketat serta alokasi yang efisien. Kolaborasi antar lembaga diperkuat melalui reformasi birokrasi dan insentif bagi sektor ekonomi. Di bidang energi dan lingkungan, diperlukan kebijakan tegas untuk transisi energi dan stabilitas harga komoditas. Reformasi TNI-Polri juga perlu ditingkatkan dengan transparansi, profesionalisme, dan pengawasan independen. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

### C. PENUTUP

Dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, terdapat berbagai capaian signifikan, seperti penghapusan utang UMKM, kenaikan upah minimum, program makan bergizi gratis, serta kebijakan di sektor pertanian dan haji. Namun, kabinet ini juga menghadapi berbagai polemik, termasuk rendahnya kinerja beberapa menteri, inkonsistensi kebijakan, tata kelola anggaran yang buruk, serta tantangan dalam kolaborasi antar lembaga dan sektor ekonomi. Selain itu, sektor energi dan lingkungan masih memerlukan kebijakan yang lebih tegas, sementara reformasi TNI-Polri masih menjadi tuntutan publik. Oleh karena itu, langkah strategis seperti peningkatan komunikasi antar kementerian, transparansi kebijakan, pengelolaan anggaran yang lebih baik, serta reformasi di berbagai sektor perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dzikry Subhanie. (n.d.). Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran. <https://scope.sindonews.com/artikel/541/plus-minus-100-hari-pemerintahan-prabowogibran>
- ENO. (n.d.). Kenapa Dinamakan Kabinet Merah Putih? Ini Alasannya. RILISID. <https://rilis.id/Nasional/Berita/Kenapa-Dinamakan-Kabinet-Merah-Putih-Ini-Alasannya-kR1MLgh>
- Humas. (2025). Catatan 100 Hari Kabinet Merah Putih, Langkah Awal Menuju Perubahan Besar. <https://setkab.go.id/catatan-100-hari-kabinet-merah-putih/>

Laporan 100 Hari Kabinet Prabowo- Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan. (2025). Celios. <https://celios.co.id/100-day-report-of-the-prabowo-gibran-cabinet-performance-challenges-and-expectations/>

Muharil. (n.d.). Kabinet Merah Putih Baru: Harapan dan Tantangan untuk Indonesia Lebih Maju. YNDTKTS. <https://www.kompasiana.com/muharilmuharil6230/671f313fed64151fa35e4203/kabinet-merah-putih-baru-harapan-dan-tantangan-untuk-indonesia-lebih-majua?page=all#section1>

Sean Anggiatheda Sitorus. (2024). Pengertian kabinet, tugas, dan fungsinya dalam pemerintahan. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4381658/pengertian-kabinet-tugas-dan-fungsinya-dalam-pemerintahan>

100-Day report of the Prabowo- Gibran Cabinet: Performance, challenges, and expectations. (2025, January 21). <https://celios.co.id/100-day-report-of-the-prabowo-gibran-cabinet-performance-challenges-and-expectations/>

# Menganalisis Ketidakselarasan Antara Kabinet Gemuk dan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Indah Denisa Apriani

02011382429418

Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2024/2029 terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden membuka lembaran baru terhadap masa pemerintahan di Indonesia. Langkah awal dari lembaran baru ini dimulai dari diumumkannya para anggota Kabinet Merah Putih untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, sangat disayangkan ketika telah diumumkannya para anggota Kabinet Merah Putih tidak sedikit yang mengkritik bahwa kabinet ini dinilai terlalu ‘gemuk’ mengingat banyaknya tambahan-tambahan yang diakibatkan dari pemecahan beberapa kementerian. Salah satu kritik yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, ialah dia mengatakan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet baru itu berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan dikarenakan akan kementerian menangani bidang yang saling beririsan. Disaat masih banyaknya keraguan yang dilontarkan atas kabinet yang terbilang cukup ‘gemuk’ ini, Prabowo Subianto sebagai Presiden mengumumkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang akan dilakukan pada beberapa sektor, seperti pada sektor pendidikan. Hal ini memicu perasaan resah masyarakat akan efisiensi anggaran terhadap beberapa sektor yang kemungkinan besar akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak sedikit yang mulai mengkritik bahwa kabinet yang terbilang gemuk ini tidak selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan.

## B. PEMBAHASAN

Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengumumkan 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 59 wakil menteri yang akan membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk periode 2024- 2029.

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029”, kata Presiden.[1]. Setelah Presiden Prabowo melakukan pengumuman nama-nama menteri beserta wakilnya dapat dilihat bahwa adanya perpecahan beberapa kementerian, seperti ‘Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi’ menjadi ‘Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah’, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi’, dan ‘Kementerian Kebudayaan’. Hal ini memicu pertanyaan muncul di antara masyarakat, apakah memang dibutuhkan perpecahan kementerian ini?

Disaat permasalahan akan kabinet yang terbilang ‘gemuk’ ini belum reda, Presiden Prabowo Subianto dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan untuk dilakukannya penyesuaian anggaran berdasarkan kebijakan yang telah diterbitkan. Bahkan, beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Kebijakan efisiensi anggaran ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak langsung terhadap beberapa pola kerja serta sarana pendukung di berbagai kementerian dan lembaga. Beberapa bukti nyata dari dampak dari efisiensi anggaran ini contohnya pada Kementerian Perindustrian, yaitu adanya pemangkasan sebesar 44,38% atau sekitar Rp1.100.000.000.000,00 (Rp1,1 Triliun) yang mengakibatkan diperlukannya penyesuaian mengingat anggaran mereka di Tahun 2025 hanya sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Rp2,5 Triliun). Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto, menyatakan bahwa kementeriannya harus mengurangi penggunaan listrik dan air, membatasi perjalanan dinas, serta mengurangi aktivitas di lingkungan kantor.

[1] <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/>

Tak hanya berdampak pada pola kerja di kementerian dan lembaga, kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk pada kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi. Contohnya adalah penghapusan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS. Selain itu, contoh lain dari efisiensi anggaran ini ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikdasmen menetapkan efisiensi anggaran sebesar 23,95% atau sebesar Rp8.030.000.000.000,00 (Rp8,03 Triliun) dari anggaran belanja yang awalnya sebesar Rp33.500.000.000.000,00 (Rp33,5 Triliun). Berdasarkan Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, anggaran Kemendikdasmen yang paling besar ada pada Alat Tulis Kantor atau ATK (90%), Percetakan dan Suvenir (75,9%), dan Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan (73,3%). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp14.300.000.000.000,00 (Rp14,3 Triliun) dari anggaran awal sebesar Rp56.600.000.000.000,00 (Rp56,6 Triliun). Dampak pada pemangkasan anggaran ini ada pada Tunjangan dosen non-PNS sebesar Rp676.000.000.000,00 (Rp676 Miliar), Beasiswa Program KIP Kuliah sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (Rp1,3 Triliun), Beasiswa Pendidikan Indonesia sebesar Rp19.470.000.000,00 (Rp19,47 Miliar), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi sebesar Rp21.300.000.000 (Rp21,3 Miliar), dan masih banyak lagi. Pemangkasan anggaran pada program beasiswa tentunya dapat berdampak buruk dikarenakan tidak sedikit mahasiswa yang bergantung pada beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka, sehingga dengan adanya pemangkasan anggaran ini ditakutkan dapat memengaruhi mereka dalam melanjutkan pendidikan.

Berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa alokasi dana pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sehingga kebijakan efisiensi anggaran ini sangat mengkhawatirkan masyarakat karena dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah, efisiensi anggaran terhadap beasiswa yang kemungkinan akan mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Setelah banyaknya dampak dari efisiensi anggaran ini akhirnya tidak sedikit rakyat yang melakukan protes terhadap kebijakan ini hingga mengangkat kembali tentang kabinet 'gemuk'. Disaat efisiensi anggaran dilakukan di berbagai sektor hingga menimbulkan dampak yang tidak dapat diremehkan, kabinet yang terbilang 'gemuk' ini kembali menarik perhatian masyarakat dikarenakan hal ini dianggap sangat berbanding terbalik dari efisiensi yang sedang diterapkan. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa dibanding mengeluarkan anggaran yang terbilang cukup besar untuk mendanai kabinet 'gemuk' ini lebih baik anggaran yang dikeluarkan untuk menutupi efisiensi anggaran yang dilakukan atau beranggapan bahwa kedua hal ini tidak selaras dan kabinet 'gemuk' ini malah memberatkan anggaran. Banyak kritik yang dilontarkan terhadap ketidakselarasan ini, seperti kritik yang disampaikan oleh Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ia menyampaikan bahwa kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit. Nyatanya memang tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kabinet 'gemuk' ini sama sekali tidak berbanding lurus dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan efisiensi anggaran belanja dan mereka beranggapan bahwa perlu adanya perbaikan lagi terhadap kebijakan ataupun terhadap kabinet 'gemuk'.

## C. PENUTUP

Efisiensi anggaran mungkin diperlukan mengingat banyaknya anggaran yang disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi tetap saja perlu adanya pengawasan ketat bahwa anggaran yang dilontarkan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Hanya saja bukan hal itu yang dipermasalahkan masyarakat, tetapi juga sampai ke tahap kritik masyarakat terhadap kabinet 'gemuk' sehingga sangat diperlukan pengkajian ulang apakah memang diperlukannya perpecahan kementerian yang dilakukan. Perpecahan kementerian di beberapa bidang mungkin memang dibutuhkan, tetapi disaat masa-masa seperti ini tentu tidak semua masyarakat dapat berpikir kritis sehingga perpecahan kementerian ini haruslah didampingi dengan alasan yang jelas serta benar-benar dibutuhkan untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, M. I., & Sartika, R. E. (2025, Februari 13). *Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya?* Retrieved from [kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/13/170000765/anggaran-pendidikan-kena-imb-efisiensi-apa-saja-rinciannya](https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/13/170000765/anggaran-pendidikan-kena-imb-efisiensi-apa-saja-rinciannya)
- Octavia, E. C. (2025, Februari 8). *Efisiensi Anggaran 2025: Kebijakan Prabowo dan Dampaknya Terhadap PNS Serta Ekonomi Nasional*. Retrieved from [ekonomi.feb.unesa.ac.id: https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/efisiensi-anggaran-2025-kebijakan-prabowo-dan-dampaknya-terhadap-pns-serta-ekonomi-nasional](https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/efisiensi-anggaran-2025-kebijakan-prabowo-dan-dampaknya-terhadap-pns-serta-ekonomi-nasional)
- Rizkina, P., & Albahi, M. (2025). Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, Oktober 20). *Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah-Putih, di Istana Merdeka, Jakarta*. Retrieved from [setkab.go.id: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/](https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/)
- Subekti. (2024, Oktober 23). *Apa Saja Kementerian yang Dipecah sehingga Kabinet Merah Putih Prabowo Jadi Gemuk?* Retrieved from [tempo.co: https://www.tempo.co/politik/apa-saja-kementerian-yang-dipecah-sehingga-kabinet-merah-putih-prabowo-jadi-gemuk](https://www.tempo.co/politik/apa-saja-kementerian-yang-dipecah-sehingga-kabinet-merah-putih-prabowo-jadi-gemuk)—1096353
- Sukanto, I. (2025, Februari 10). *Pemangkasan Anggaran ala Prabowo Dinilai Tak Akan Berhasil selama Kabinet Gemuk Dipertahankan*. Retrieved from [tempo.co: https://www.tempo.co/ekonomi/pemangkasan-anggaran-ala-prabowo-dinilai-tak-akan-berhasil-selama-kabinet-gemukdipertahankan](https://www.tempo.co/ekonomi/pemangkasan-anggaran-ala-prabowo-dinilai-tak-akan-berhasil-selama-kabinet-gemukdipertahankan) 1205013

# Menilai 100 Hari Kabinet Merah Putih Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2045

Muhammad Fawzy Abyaz

02011382429446

Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 menjadi awal dari babak baru dalam pemerintahan Indonesia. Dengan mengusung visi besar menuju Indonesia Emas 2045, pemerintahan ini bertekad untuk menciptakan kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat ketahanan pangan, serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Namun, seperti pemerintahan sebelumnya, 100 hari pertama Kabinet Merah Putih tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sejumlah kebijakan mendapat apresiasi, sementara yang lain menghadapi kritik akibat hambatan dalam pelaksanaan.

Dalam perjalanannya, pemerintahan ini harus menghadapi kendala baik dari dalam maupun luar negeri. Di tingkat domestik, birokrasi yang masih kompleks serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang dapat menghambat realisasi program-program unggulan. Sementara itu, dari sisi eksternal, fluktuasi ekonomi global serta ancaman perubahan iklim turut memberikan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, refleksi terhadap pencapaian serta permasalahan yang muncul dalam 100 hari pertama ini menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan nasional atau tidak. Apalagi dengan adanya visi besar Indonesia Emas 2045, dari awal inilah kita bisa melihat apakah hal itu bisa terwujud? Apakah visi Indonesia Emas 2045 akan terwujud? Ataukah malah terjadi Indonesia cemas di 2045.

## B. PEMBAHASAN

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan usaha kecil serta menengah. Salah satu langkah yang diambil yaitu adalah penghapusan utang UMKM dengan nilai yang cukup signifikan. Selain itu, pemerintah menaikkan

rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen, hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ada juga program stimulus ekonomi yang diarahkan untuk memperkuat sektor industri kecil melalui bentuk insentif pajak dan subsidi.

Walaupun kebijakan-kebijakan ini bertujuan baik, tetapi pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Seperti penghapusan utang UMKM dan berbagai program lainnya membutuhkan anggaran yang besar, jelas hal ini sangat berpotensi meningkatkan defisit negara. Belum lagi dengan faktor lain seperti adanya potensi penggelapan uang anggaran, walau saya tau bahwa hal ini belum tentu terjadi.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlunya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan juga menarik lebih banyak investasi, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, insentif bagi industri dalam negeri juga perlu diperkuat dengan harapan terjadinya pertumbuhan dalam sektor produksi.

Menurut data dari CELIOS, kinerja pemerintahan saat ini belum memadai dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Dikatakan juga beberapa Menteri seperti Natalius Pigai (Menteri HAM), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dan Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) memiliki penilaian yang rendah dalam kinerjanya. Terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitas pemerintahan seperti penurunan kualitas komunikasi sampai inkonsistensi dalam implementasi kebijakan.

Dari data CELIOS Capaian program yang dilakukan pemerintah beberapa belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh adalah program makan siang gratis, tujuan program ini bagus yaitu untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Tetapi program ini bisa menyebabkan anggaran negara membengkak, dan hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran. Hal ini menyebabkan pemecatan massal

pegawai honorer, bukankah hal ini malah menciptakan masalah yang lebih besar? Ketika anak-anak mereka mendapat makan siang gratis di sekolah tetapi orangtua mereka di pecat dari pekerjaannya, lantas bagaimana mereka mendapat makan malam ataupun sarapan? Bagaimana dengan kebutuhan yang lainnya? Inilah masalahnya, saya pernah mendengar kata-kata seperti ketika kepakan sayap kupu-kupu dapat menyebabkan badai, walau saya mungkin salah dalam menafsirkan apa yang disebut *butterfly effect*.

Apa yang saya lebih khawatirkan adalah efisiensi anggaran ini mencakup ke bidang pendidikan. Jika ini terjadi, maka tujuan Indonesia Emas 2045 hanyalah khayalan belaka. Ketika semua negara lain berlomba memajukan pendidikan, negara kita malah tidak melakukannya. Untuk solusinya sendiri, menurut saya diperlukan adanya langkah tegas dari pemerintah. Bisa dengan peninjauan ulang program makan siang gratis ini, ataupun memberikan kebijakan baru untuk mengatasi masalah anggaran.

### C. PENUTUP

Dalam 100 hari pertama kabinet merah-putih ini, telah menunjukkan seberapa besar tantangan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Walaupun ada beberapa masalah dalam penyelenggaraan program ataupun kinerja Menteri, tetapi ini barulah awal dari kabinet merah-putih sehingga hal ini masih bisa diperbaiki. Kita harus lebih waspada dan perhatian terhadap masalah penilaian ini, karena hal ini dapat mempengaruhi tujuan Negara Indonesia kedepannya. Hal ini agar kesalahan pemerintahan yang dulu tidak terulang dan kinerjanya lebih baik dari pemerintahan yang sebelumnya, agar Indonesia cemas 2045 hanyalah kecemasan belaka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Askari, M. W., Adhinegara, B. Y., Muhammad, G. D., Fiori, B., Darmawan, J., & Saleh, M. (2025). Rapor 100 hari Prabowo-Gibran. 23. <https://celios.co.id/wpcontent/uploads/2025/01/Rapor-100-Hari-Prabowo-Gibran-Fx-2025.pdf>
- Fadilah, A. F. (2025, Februari 13). Kumparan. <https://kumparan.com/skyyblauw/efisiensianggaran-demi-program-makan-gratis-tapi-salah-sasaran-24U8fRJME3x>

- Mardiana, A. (2025, Februari 13). Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/berita/nasional/67ad665e2935f/program-makan-siang-gratis-tuai-polemik-efisiensi-anggaran-hingga-isu-phk>

# Menakar 100 Hari Kabinet Merah Putih: Janji, Capaian, dan Tantangan Ke Depan

Shalwa Try Huwaidah  
02011182429037  
Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Setiap pemerintahan yang baru terbentuk selalu menghadapi ekspektasi besar dari masyarakat. Kabinet merah putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terkecuali. Sejak dilantik, berbagai janji telah disampaikan kepada publik, mulai dari pemulihan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik. Periode 100 hari pertama menjadi momen krusial untuk menilai apakah pemerintahan baru mampu merealisasikan visi dan misi secara nyata. Dalam periode ini, publik dan para pengamat mulai melihat kebijakan yang diambil, efektivitas implementasi program, serta dampaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dalam 100 hari pertama kabinet merah putih menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintahan ini dalam mewujudkan janjinya.

Meskipun beberapa langkah telah diambil beberapa tantangan besar masih menghambat jalannya pemerintahan. Beberapa permasalahan utama yang muncul dalam 100 hari pertama ini meliputi:

1. Ketidakstabilan Ekonomi
2. Reformasi Birokrasi
3. Distribusi Bantuan Sosial
4. Pembangunan Infrastruktur
5. Dinamika Politik dan Kebijakan Kontroversial

Evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan sangat penting karena periode ini menentukan arah kebijakan kedepan. Jika permasalahan yang ada tidak segera diatasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bisa menurun, yang pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program-program berikutnya. Selain itu pemerintahan harus mampu menunjukkan progress nyata agar dapat mempertahankan dukungan dari masyarakat. Sebuah evaluasi yang objektif dan berbasis data akan membantu

pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan sehingga bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis 100 hari pertama kabinet merah putih berdasarkan kebijakan yang telah diimplementasikan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan programnya, dan mengevaluasi dampak kebijakan yang telah dijalankan terhadap masyarakat dan berbagai sektor.

## B. PEMBAHASAN

Setiap awal perjalanan pemerintahan pastinya membawa harapan baru untuk negara, begitu pula dengan kabinet merah putih, yang dalam 100 hari awal perjalanannya menjadi sorotan masyarakat. Pastinya masyarakat ingin melihat dan mengetahui sejauh mana visi misi yang dijanjikan pada masyarakat mulai dari diwujudkan, lalu bagaimana permasalahan bangsa ditangani, dan perubahan nyata apa yang mereka rasakan. Namun perjalanan kabinet merah putih pastilah tidak mudah ada banyak tantangan besar yang ada mulai dari ketidakstabilan ekonomi, reformasi dan birokrasi hingga dinamika sosial dan politik, disisi lain pemerintahan juga terus berusaha menghadirkan terobosan terbaru agar Indonesia bisa terus melangkah maju.

“Dalam 3 bulan kita, kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, berpihak kepada kepentingan Negara”[1]-Presiden RI Prabowo Subianto, Sidang kabinet Paripurna 22 Januari 2025.

Hasil utama studi CELIOS menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memperoleh nilai rapor 5 dari 10, sementara Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden mendapatkan nilai 3 dari 10. Penilaian ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan belum memadai dan memerlukan perbaikan yang signifikan.[2]

Esai ini akan membahas bagaimana perjalanan 100 hari pertama kabinet merah putih. Sejauh mana janji-janji yang disampaikan mulai diwujudkan? Apa saja perubahan

[1] <https://setkab.go.id/catatan-100-hari-kabinet-merah-putih/>

[2] <https://celios.co.id/rapor-100-hari-kabinet-prabowo-gibran-kinerja-tantangan-dan-harapan/>

yang sudah dirasakan masyarakat? Dan di sisi lain, tantangan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah? Dengan menggali data dan mendengarkan suara masyarakat, kita bisa menilai apakah langkah awal pemerintahan ini sudah berjalan di jalur yang benar atau masih perlu banyak perbaikan.

Sejak awal, Kabinet Merah Putih membawa harapan besar bagi masyarakat dengan berbagai janji perubahan tentunya masyarakat menantikan langkah nyata pemerintah dalam:

1. Memulihkan ekonomi dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil agar masyarakat tidak semakin terbebani.
2. Menyederhanakan birokrasi supaya pelayanan publik lebih cepat, mudah, dan tidak berbelit.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program bantuan dan subsidi yang benar-benar tepat sasaran.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur serta digitalisasi layanan agar akses dan pelayanan bagi masyarakat lebih merata.
5. Menjaga stabilitas politik dan memperkuat persatuan agar bangsa ini tetap solid dan tidak terpecah karena perbedaan.

Janji-janji ini memberikan harapan bahwa pemerintahan baru akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, bagaimana realisasi dari janji-janji tersebut dalam 100 hari pertama?

Dalam 100 hari pertama, beberapa kebijakan telah diimplementasikan oleh kabinet merah putih, antara lain:

1. Kebijakan ekonomi dan stabilitas harga, pemerintah telah mulai memberikan subsidi untuk beberapa bahan pokok agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk menarik investasi dan mendukung para pelaku UMKM agar ekonomi bisa terus bergerak. Namun, kenyataannya harga kebutuhan masih naik dan inflasi tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini membuat banyak orang masih merasa khawatir dengan kondisi ekonomi ke depan.
2. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, pemerintah berupaya mempercepat penggunaan layanan digital agar masyarakat tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang rumit. Beberapa layanan administrasi kini sudah bisa diakses secara online, sehingga lebih praktis dan efisien. Namun, dalam

pelaksanaannya, masih ada kendala yang perlu dievaluasi agar sistem ini benar-benar bisa membantu dan memudahkan semua orang.

3. Subsidi dan bantuan sosial, pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada bantuan ini. Namun, dilapangan, masih ada kendala dalam pendistribusiannya. Di beberapa daerah, bantuan belum sepenuhnya merata, membuat sebagian masyarakat masih harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Infrastruktur dan pembangunan nasional, pemerintah terus bergerak cepat membangun jalan tol, bendungan, dan berbagai infrastruktur lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di lapangan masih ada tantangan yang dihadapi, seperti pembebasan lahan yang belum tuntas dan keterbatasan anggaran. Hal ini membuat beberapa proyek strategis berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
5. Dinamika politik dan keamanan nasional, pemerintah berusaha meredakan ketegangan politik setelah pemilu dengan membuka ruang dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak. Sejauh ini, situasi politik terbilang cukup stabil, tetapi ditengah upaya tersebut, masih ada beberapa kebijakan yang menimbulkan perdebatan dimasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspirasi yang perlu didengar dan dipertimbangkan agar kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

Meskipun sudah ada langkah langkah nyata dalam 100 hari pertama, masih banyak tantangan yang dihadapi agar janji terealisasi dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih ke depan, antara lain:

1. Harga kebutuhan pokok masih naik  
Pemerintah memang sudah berusaha menjaga harga bahan pokok dengan subsidi, tapi dilapangan, harga masih terasa mahal bagi banyak orang. Perlu strategi yang lebih kuat, seperti memastikan stok selalu cukup. Memperbaiki rantai distribusi, dan mendukung petani serta produsen lokal agar harga lebih stabil.
2. Birokrasi dan digitalisasi yang masih tertatih  
Banyak layanan pemerintah yang sudah mulai berbasis digital, tapi tidak semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah, terutama di daerah yang masih ada kebiasaan

birokrasi lama yang membuat urusan lambat. Pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi benar benar mempermudah, bukan malah membuat masyarakat bingung.

### 3. Bantuan sosial yang belum merata

Program bantuan sudah mulai disalurkan, tapi masih banyak orang yang seharusnya mendapat bantuan. Ada juga yang mendapat bantuan padahal sebenarnya tidak memenuhi syarat. Data penerima harus diperbaiki supaya bantuan benar benar sampai ke orang yang membutuhkan.

### 4. Pembangunan infrastruktur yang masih terlambat

Jalan tol, bendungan dan proyek besar lainnya memang penting, tapi prosesnya sering terhambat karena masalah pembebasan lahan atau keterbatasan dana. Pemerintah harus mencari cara agar pembangunan tetap cepat, tetapi tetap adil bagi masyarakat yang terdampak.

### 5. Menjaga persatuan ditengah perbedaan

Setelah pemilu, suasana politik cukup tenang, tapi masih ada perpecahan dimasyarakat karena berbeda pilihan. Pemerintah mempunyai tugas untuk menyatukan kembali rakyat dengan kebijakan yang adil dan merangkul semua pihak, agar bangsa ini bisa maju bersama tanpa terpecah belah.

## C. PENUTUP

Dalam 100 hari pertama, kabinet merah putih telah menunjukkan berbagai upaya dan pencapaian, namun masih ada tantangan besar yang perlu segera diatasi. Beberapa janji kampanye mulai direalisasikan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah perlu melihat evaluasi ini sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran. Dengan langkah yang lebih nyata, kepemimpinan yang kuat, serta dukungan dari seluruh rakyat agar harapan menjadikan bangsa Indonesia lebih baik tergapai.

## DAFTAR PUSTAKA

celios.co.id. (2025, Januari 21). *100-Day Reports of the Prabowo-Gibran Cabinet: Performance, Challenges, dan Expectations*. Retrieved from celios.co.id: <https://celios.co.id/rapor-100-hari-kabinet-prabowo-gibran-kinerja-tantangan-dan-harapan/>

Falentino, R. (2025, Januari 30). *Menanggapi "Expert Judgement" 100 Hari Kabinet Prabowo*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/kolom/d-7755608/menanggapi-expert-judgement-100-hari-kabinet-prabowo/amp>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Februari 5). *100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih, Menkeu Sri Mulyani: Bea Cukai Berhasil Cegah Kerugian Negara Rp820 Miliar*. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bea-Cukai-Cegah-Kerugian-Negara-Rp820-Miliar>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2025, Februari 4). *Kolaborasi Kementerian PANRB dan Komdigi Perkuat Kebijakan Pemerintah Digital*. Retrieved from www.menpan.go.id: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kolaborasi-kementerian-panrb-dan-komdigi-perkuat-kebijakan-pemerintah-digital>

Sakti, T. N. (2025). *Evaluasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Kebijakan Nasional*. 12.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, Januari 29). *Catatan 100 Hari Kabinet Merah Putih, Langkah Awal Menuju Perubahan Besar*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/catatan-100-hari-kabinet-merah-putih/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, Februari 29). *Tag: 100 Hari Kabinet Merah Putih*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/tag/100-hari-kabinet-merah-putih/>

# Keefektifan Kebijakan Makan Bergizi Gratis Untuk Kemajuan Mencapai Indonesia Emas 2045

Dzaky Nesta Rabbani  
02011182429099  
Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui makanan sehat dan bergizi. Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah memulai program makan bergizi gratis ini pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program makan gratis ini dimulai sejak 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Pemerintah menargetkan pemberian makan gratis untuk 15 hingga 20 juta penerima manfaat tahun ini. Mulai dari peserta didik jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut makanan bergizi gratis yang digagas Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menysasar 82,9 juta jiwa.[1]

Program MBG dapat berperan penting dalam menangani ketimpangan gizi di Indonesia. Bahkan program ini dapat menjadi strategi yang baik untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak-anak. Akan tetapi, kebijakan ini apabila kita melihatnya dalam beberapa hal muncul keraguan seperti bagaimana keefektifan kedepannya dan apakah makan siang gratis ini dapat berlanjut secara konsisten mengingat bahwa anggaran yang dibutuhkan sangat fantastis. Adanya anggaran yang besar ini perlu digunakan untuk hal-hal yang menjadi prioritas seperti meningkatkan SDM bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Melalui essay ini kita akan mencari tahu mengenai bagaimana keefektifan makan bergizi gratis ini.

## B. PEMBAHASAN

Program MBG bertujuan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi, terutama

bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan laporan FAO (2022), sekitar 45 juta anak di seluruh dunia mengalami malnutrisi yang berdampak langsung pada performa akademik dan pertumbuhan fisik mereka. Di Indonesia, masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menunjukkan bahwa angka stunting nasional mencapai 21,6%, yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak dan kemampuan mereka dalam menyerap materi pelajaran.[2] Oleh sebab itu, pemerintah mengambil tindakan untuk menekan angka stunting yang ada. Adanya program ini adalah harapan pemerintah agar bangsa ini dapat mengatasi kekuatan negara berupa sumber daya manusia.

Sumber daya manusia menjadi faktor penting demi kemajuan bangsa. Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini terutama di wilayah terpelosok terdapat banyak anak-anak yang memerlukan asupan bergizi atau makanan untuk melanjutkan hidupnya. Akan tetapi, apabila kita melihat dari kaca mata yang lain bukan Makanan yang membuat maju tetapi pendidikan. Pendidikan dapat menjadi senjata pamungkas bangsa untuk mengatasi kebodohan.

Memang benar adanya permasalahan malnutrisi dapat menyebabkan permasalahan kognitif akan tetapi apa yang menjadi permasalahan kita untuk mewujudkan Indonesia emas adalah inkonsistensi dari kebijakan pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana pemerintah melakukan efisiensi anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan untuk melakukan proyek-proyek ambisiusnya padahal di dalam kabinet terlalu banyak kementerian yang sebenarnya merupakan keborosan yang tidak efisien sama sekali. Menurut penulis inkonsistensi ini menimbulkan keraguan terhadap kebijakan pemerintah seperti makan siang gratis untuk memajukan SDM karena pemerintah bahkan melakukan pemotongan anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan. Permasalahan selanjutnya

[1] Junaedi, Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045, penerbit eureka, 2025

[2] Rifiy Qomarrullah, "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan", Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol.5 No.2 (2025), 131.

terletak pada kekurangan pangan pada suatu daerah. Studi oleh Wibowo dan Iskandar (2021) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan MBG telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah, implementasinya terkendala oleh infrastruktur yang buruk dan distribusi pangan yang tidak merata. Banyak daerah yang bergantung pada sumber daya lokal yang terbatas, yang sering kali menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan pangan bergizi.[3] Berdasarkan studi tersebut pemerintah perlu mengatasi pangan bergizi karena apabila tidak dilakukan kapan lagi kita mencapai Indonesia emas 2045. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak cepat dalam menangani ini maka program ini akan berjalan lambat atau bahkan lebih parahnya berhenti.

Menghilangkan program makan bergizi gratis menjadi pilihan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak berjalan dengan baik. Pemerintah perlu memutuskan apa yang menjadi prioritas demi kemajuan bangsa. Bukan berarti program makan bergizi gratis tidak bertujuan dengan baik. Akan tetapi, banyak faktor yang menjadi penghambat dari program ini dapat menyebabkan kehancuran. Perlu keputusan yang tepat dalam membuat suatu kebijakan karena biaya dari MBG sangat besar. Apalagi saat ini Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi untuk menekan angka pengangguran.

### C. PEMBAHASAN

Program MBG memiliki banyak faktor penghambat dalam menjalankan kebijakannya dimulai dari infrastruktur yang buruk dan juga distribusi pangan yang belum merata. Pemerintah perlu membuat kebijakan dengan konsisten dan terencana agar tidak mengalami kehancuran. Terutama pemerintah juga perlu memutuskan kebijakan apa yang menjadi prioritas saat ini karena apabila tujuan dari MBG ialah memajukan SDM maka pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan anggaran dari pendidikan dan kesehatan.

### DAFTAR PUSTAKA

Fatimah, Siti et al.(2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation* Vol.4 No.1, 14-21.

Karso, Junaedi. (2025). Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045. Eureka Media Aksara.

Qomarrullah, Rifiy., dkk. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication* Vol.5 No.2 (2025), 131.

[3] Siti Fatimah et al. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan, *Journal of Governance and Policy Innovation* Vol.4 No.1(2024),

# Seratus Hari Kabinet Merah Putih: Evaluasi Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Nadia Umami Nabilah  
02011382429466  
Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki babak baru kepemimpinan sejak pemilihan umum presiden 2024 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya menjadi pasangan terpilih pada periode 2024-2029. Terpilihnya pasangan tersebut membuat terbentuknya susunan kabinet pemerintahan Republik Indonesia periode 2024-2029 yang diberi nama “Kabinet Merah Putih.” Kepemimpinan Prabowo-Gibran bersama dengan Kabinet Merah Putih berlangsung sejak 21 Oktober 2024. Perjalanan yang belum lama dari Kabinet Merah Putih banyak menuai pro dan kontra di Indonesia, munculnya penilaian kritis dari publik serta ekspektasi masyarakat mengenai kebijakan yang diberlakukan di berbagai sektor, terutama dibidang hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya yang menjadi sorotan publik memuat rapor penilaian masyarakat terhadap kinerja awal 100 hari sejak pelantikan.

Periode 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi momen awal bagi publik untuk menilai sejauh mana realisasi janji-janji kampanye dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Kinerja awal dari Kabinet Merah Putih dapat menjadi gambaran terkait akan seperti apa masa depan Indonesia, semakin besar kebijakan yang dinilai berdampak baik maka akan semakin positif juga pandangan masyarakat terhadap pemerintahan dan berlaku sebaliknya.

Belum lama ini, terdapat kebijakan baru yang dianggap kontradiktif dengan sistem pemerintahan saat ini. Munculnya kebijakan efisiensi anggaran yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara sehingga mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan dana. Namun, hal ini menjadi sorotan serta menuai kritik di masyarakat. Pasalnya, belum lama ditetapkan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada 22 Januari 2025, Kementerian Pertahanan justru menggelar acara pelantikan

staff khusus menteri pertahanan yang dinilai tidak sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Selain itu, tumbuhnya keawatiran masyarakat mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang akan berdampak langsung pada sektor pelayanan publik dan sektor vital, seperti sektor pendidikan dan kesehatan yang tentunya merupakan hal krusial bagi masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

Efisiensi anggaran salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya finansial serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas kinerja suatu organisasi.[1] Sementara itu, dalam pengelolaan negara, pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk menggunakan dana secara tepat. Secara umum, efisiensi anggaran dilakukan dengan mengalihkan atau mengurangi anggaran ke sektor yang dianggap lebih tepat dengan fokus pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan memastikan bahwa setiap anggaran mampu memberikan hasil yang optimal.

Pada tanggal 22 Januari 2025, kebijakan efisiensi anggaran resmi diberlakukan di Indonesia. Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).[2] Kebijakan ini merupakan upaya strategis dari pemerintah untuk mengelola pengeluaran negara dengan lebih efisien, sekaligus mengurangi defisit fiskal yang diperkirakan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai 3 persen dari batas yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003

Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan efisiensi sebesar Rp306.695.177.420.000.00 (tiga ratus enam triliun enam

[1] Sahabat Pegadaian, “Efisiensi Anggaran 2025, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?” (<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/efisiensi-anggaran-2025>, diakses 20 Maret 2025)

[2] Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025

ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:

- Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
- Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam pemangkasan ini, kementerian/lembaga yang berfokus pada kepentingan layanan publik turut terkena dampaknya sehingga kebijakan ini menjadi sorotan masyarakat. Di satu sisi, hal ini dapat menjadi kebijakan yang strategis untuk pengelolaan anggaran negara dan meningkatkan perekonomian negara. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menjadi sesuatu yang berdampak langsung dan makin menekan rakyat apalagi anggaran tersebut dialokasikan kepada fokus pemerintah, salah satunya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut merupakan kementerian dan lembaga yang terkena dampak pemangkasan anggaran terbesar berdasarkan laporan kementerian keuangan:

| Kementerian/Lembaga                                    | Pemangkasan Anggaran (Rp Tr) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 81,38 T                      |
| Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains & Teknologi    | 22,54 T                      |
| Kementerian Kesehatan                                  | 19,63 T                      |
| Kementerian Perhubungan                                | 17,87 T                      |
| Kementerian Agama                                      | 14,28 T                      |
| Kementerian Keuangan                                   | 12,36 T                      |
| Kementerian Pertanian                                  | 10,28 T                      |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah              | 8,03 T                       |
| Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi & Pemasarakatan)   | 6,34 T                       |
| Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)                       | 4,81 T                       |

sumber: liputan 6

Jika dilihat dari tabel, maka secara tidak langsung terdapat pemangkasan anggaran yang signifikan, terutama pada sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, dapat mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Misalnya, pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berpotensi menghambat program-program penting yang mendukung pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan.

Terganggunya proyek fisik Kementerian PU berakibat kepada batalnya pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km dan perbaikan rutin jalan nasional sepanjang 47.603 km.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan efisiensi anggaran memiliki tujuan positif dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara, ada banyak tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan bahwa setiap langkah penghematan tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

### C. PENUTUP

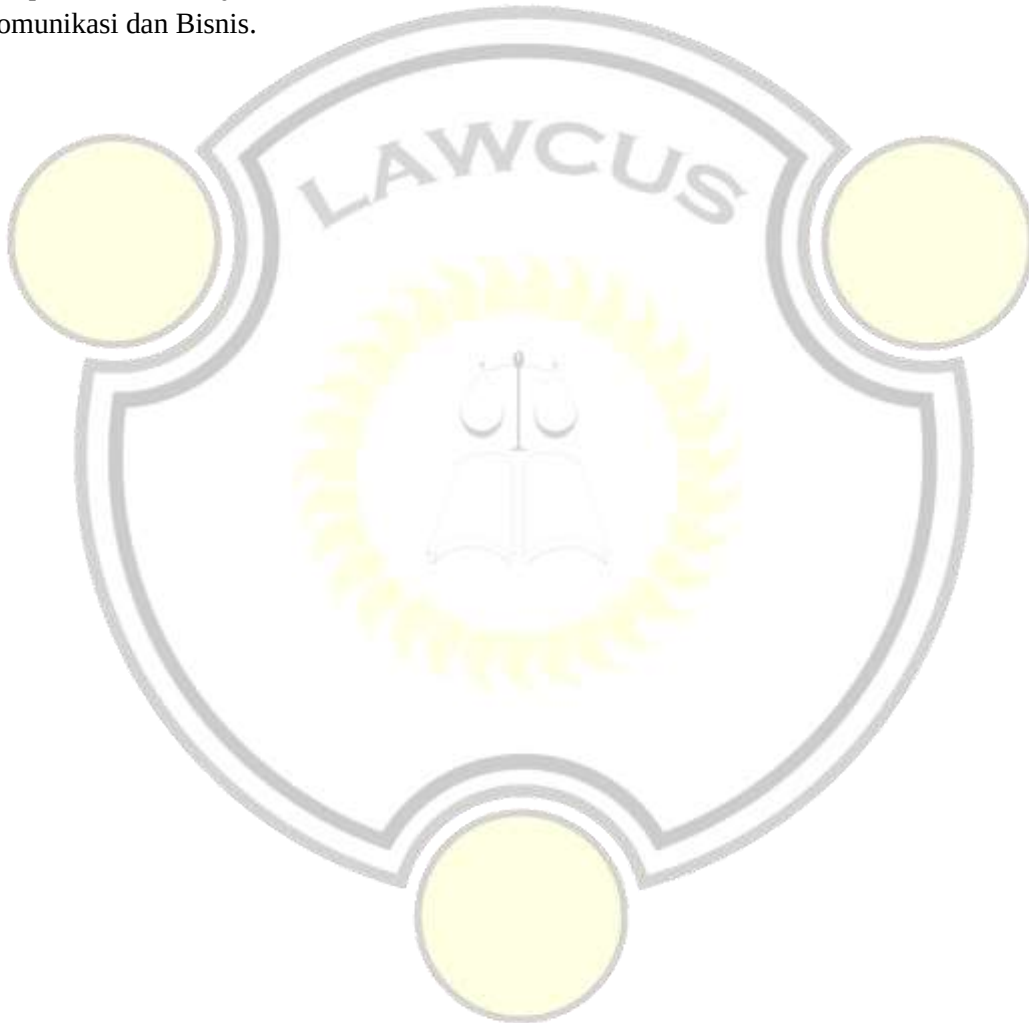
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia dalam Inpres No. 1 tahun 2025 perlu dilakukan pendekatan yang strategis dan terencana yang pada dasarnya peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun dirancang dengan niat untuk mengurangi pemborosan dan memperkuat stabilitas fiskal, kebijakan ini ternyata memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pelayanan publik. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat telah menciptakan berbagai tantangan serius dalam sektor-sektor vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini. Dengan pendekatan yang lebih luas dan berdasarkan data untuk memastikan bahwa efisiensi tidak hanya menjadi jargon melainkan dapat diimplementasikan secara nyata tanpa mengorbankan hak-hak dasar rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Irawati. (2025, Feb 13). Kritik Mengalir, Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Berisiko. Infobanknews. <https://infobanknews.com/kritik-mengalir-efisiensi-anggaran-prabowo-dinilai-berisiko/>
- Jaharuddin & Muchtar, Masruri. (2025, Februari). Efisiensi Anggaran dan Produktivitas Nasional, Navigasi Kebijakan di Tengah Tantangan. Republika. <https://analisis.republika.co.id/berita/srwxja393/efisiensi-anggaran-dan-produktivitas-nasional-navigasi-kebijakan-di-tengah-tantangan>

- Rizka Nur Laily Muallifa. (2025, Feb 1). Sederet Lembaga yang Paling Terdampak dengan Inpres Efisiensi Anggaran 2025. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5918299/sederet-lembaga-yang-paling-terdampak-dengan-inpres-efisiensi-anggaran-2025?page=6>
- Sakti, Tri Nugraha. (2025). Evaluasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Analisi Kritis terhadap Implementasi Kebijakan Nasional. LPSR Institut Komunikasi dan Bisnis.



# 100 Hari Kabinet Merah Putih: Apakah Ada Perubahan?

Stefany Yemima

02011282429238

Genius 9

## A. PENDAHULUAN

Ajang pemilu 2024 memberikan perubahan yang signifikan pasca terpilihnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemenangan pasangan ini membuka lembaran baru bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai dukungan dan harapan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka hal ini mencerminkan kepercayaan besar yang ditaruh kepada kemampuan mereka untuk merekonstruksi negara ke arah yang lebih baik. Tidak terasa waktu terus berjalan hingga memasuki masa evaluasi 100 hari pertama masa kepemimpinan. Evaluasi 100 hari ini sudah menjadi semacam tradisi politik di Indonesia. Dengan adanya evaluasi 100 hari dapat dijadikan sebagai tolak ukur awal dalam menilai efektivitas dan keberhasilan pemerintah baru dalam merealisasikan janji-janji kampanye mereka. Masyarakat, pengamat politik, serta media secara kritis mencermati berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan langkah strategis yang diambil sebagai bentuk upaya mewujudkan perubahan positif yang telah dijanjikan pada masa kampanye.

Kabinet Merah Putih merupakan nama yang diberikan oleh Prabowo Subianto untuk susunan kabinet pemerintahan periode 2024-2029. Terdiri dari 48 menteri dan 59 wakil menteri, kabinet ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Besarnya struktur ini dinilai masyarakat terlalu 'gemuk' dan menimbulkan tanda tanya: apakah kabinet ini kaya struktur tetapi miskin fungsi, atau kaya dua-duanya dikarenakan kabinet ini menghabiskan anggaran sebesar 777 miliar rupiah, hampir dua kali lipat dari kabinet pada era Joko Widodo.[1]

## B. PEMBAHASAN

Dalam 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto salah satu kebijakan signifikan yang

diimplementasikan adalah penghapusan utang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghapusan utang yang diberikan ini jika UMKM memiliki utang maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan, memiliki sektor usaha meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lainnya, dan adanya kondisi khusus: debitur yang terdampak permasalahan seperti bencana alam atau pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial UMKM yang mengalami kredit macet, sehingga mereka dapat kembali aktif dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Pemerintah berharap bahwa dengan penghapusan utang ini, para pelaku UMKM dapat melanjutkan usaha mereka tanpa beban finansial yang menghambat, sehingga berkontribusi lebih efektif dalam perekonomian nasional.[2]

Pada Desember 2024 Presiden Prabowo menghadiri konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) D-8 di Kairo Mesir. Dalam pertemuan ini, Indonesia ditetapkan untuk menerima jabatannya sebagai ketua D-8 dari Mesir untuk periode 2026-2027. Jika Indonesia menjadi ketua D-8 pada periode 2026-2027 dapat berpotensi meningkatkan posisi strategis Indonesia secara global dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara lainnya.[3] Beberapa kebijakan yang dirancang pada November seperti gaji guru ASN akan naik setara satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan menerima tunjangan sebesar Rp1 juta per bulan mulai tahun 2025, upah minimum nasional untuk tahun 2025 diumumkan naik sebesar 6,5% dan penurunan harga tiket pesawat mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025

[1] Wasisto, R. J. (2024 ). Kabinet Merah Putih gemuk, bagaimana proses pendanaan dan pengawasannya? NU Online. Diakses pada 15 Maret 2025, dari <https://www.nu.or.id/nasional/kabinet-merah-putih-gemukbagaimana-proses-pendanaan-dan-pengawasannya-1mZCP>.

[2] Antara News. (2025 ). Penghapusan kredit macet UMKM, ini tahap dan kriteria yang ditetapkan. Diakses pada 15 Maret 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/4564570/penghapusan-kredit-macet-umkm-initalap-dan-kriteria-yang-ditetapkan>.

[3] Antara News. (2024 ), Desember 19). Prabowo hadir KTT D-8, wakil Indonesia, terima keketuaan untuk 2026. Diakses pada 15 Maret 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/4531870/prabowo-hadiri-ktt-d-8-wakil-indonesia-terima-keketuaan-untuk-1016>.

mengalami kendala pada Desember 2024 hingga Desember 2025. Meskipun pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji guru dan upah minimum, beberapa anggota DPR mengingatkan agar tidak ada hambatan birokrasi yang dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan tersebut. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa kenaikan gaji dan upah benar-benar diterima oleh para guru dan pekerja sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, meskipun ada instruksi untuk menurunkan harga tiket pesawat, beberapa maskapai mengalami kesulitan dalam menyesuaikan harga tiket sesuai arahan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh faktor operasional dan biaya yang harus dipertimbangkan oleh maskapai. Akibatnya, penurunan harga tiket pesawat tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana.[4]

Pemerintah Indonesia merencanakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 11% mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, rencana ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, pengusaha, dan anggota parlemen yang khawatir bahwa kenaikan PPN dapat melemahkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai respons, pemerintah mempertimbangkan untuk menerapkan kenaikan tarif PPN hanya pada barang dan jasa mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari PPN. Meskipun demikian, keputusan ini masih menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak mengkritik bahwa barang mewah sudah memiliki klasifikasi dan tarif tersendiri dalam UU Perpajakan, sehingga kenaikan PPN justru mempengaruhi barang-barang yang tidak tergolong mewah. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai siapa yang menginisiasi kenaikan PPN ini, dengan beberapa pihak menuding bahwa kebijakan ini merupakan hasil kinerja partai tertentu di DPR pada periode sebelumnya. Inkonsistensi dalam komunikasi dan implementasi kebijakan kenaikan PPN ini telah menimbulkan kebingungan dan polemik di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan memangkas belanja negara sebesar Rp306,7 triliun. Pemangkasan ini mencakup Rp156,1 triliun dari belanja kementerian dan lembaga serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.[6] Dampaknya, beberapa kementerian menerapkan kerja fleksibel dan penghematan listrik serta air. Selain itu, gaji ke-13 dan THR bagi PNS dihapus, serta ada pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS, yang berisiko memicu gejolak sosial. Dana hasil efisiensi akan dialihkan untuk program prioritas seperti makan siang gratis bagi 81 juta siswa dan ibu hamil.[7] Kebijakan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai masyarakat dan memicu aksi protes dari mahasiswa. Gerakan "Indonesia Gelap" muncul sebagai respons terhadap pemotongan anggaran yang dianggap dapat melemahkan sistem pendidikan dan layanan sosial.[8]

Kita perlu menyadari bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal merumuskan strategi besar atau menyusun rencana ambisius, tetapi lebih pada kemampuan untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut dengan konsisten dan berkelanjutan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang telah memberikan berbagai janji dan program unggulan melalui visi mereka yang tertuang dalam dokumen Asta Cita. Namun, dalam kenyataannya, kita harus menghadapi fakta bahwa banyak dari janji kampanye tersebut yang belum sepenuhnya terealisasi.

Menurut peneliti senior Litbang Kompas survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat tinggi, dengan angka mencapai 80,9 %, dan tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai angka 89,4 % memang bisa terlihat menggembirakan.[9] Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Program-program unggulan yang disampaikan oleh

[4] 4Tempo. (2024, November 10). JPPI kritik rencana kenaikan gaji guru yang sudah sejahtera. Diakses pada 15 Maret 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/jppi-kritik-rencana-kenaikan-gaji-guru-yang-sudah-sejahtera-1174971?utm>.

[5] Pajak.go.id. (2024 ). Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 Januari 2025. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://www.pajak.go.id/en/node/113455?utm>.

[6] Universitas Gadjah Mada. (2025). Efisiensi anggaran sulit tercapai, pakar UGM sebut pemerintah hadapi perilaku boros dalam birokrasi. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://ugm.ac.id/berita/efisiensi-anggaran-sulit-tercapai-pakar-ugm-sebut-pemerintah-hadapi-perilaku-boros-dalam-birokrasi/>

[7] Hukumonline. (2025 ). Efisiensi anggaran ganggu pelayanan publik, pendidikan, hingga infrastruktur dasar. Diakses pada 1 April 2025, dari [https://www.hukumonline.com/berita/a/efisiensi-anggaran-ganggu-pelayananpublik-pendidikan-hingga-infrastruktur-dasar-lt67b1ff43ea76d/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/efisiensi-anggaran-ganggu-pelayananpublik-pendidikan-hingga-infrastruktur-dasar-lt67b1ff43ea76d/?utm_source=chatgpt.com).

[8] Pikiran Rakyat. (2025). Apa yang melatarbelakangi aksi Indonesia gelap? Ini sederet penyebabnya. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-139079194/apa-yang-melatarbelakangi-aksi-indonesia-gelap-ini-sederet-penyebabnya?page=all>

[9] Kompas TV. (2025 Januari 15). Penjelasan Peneliti Senior Litbang Kompas, Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo Gibran [Video]. YouTube. Diakses pada 3 April 2025, dari <https://youtu.be/814oQRHuunA>.

pemerintah, seperti pemberantasan judi online, penghapusan utang UMKM, dan program makan bergizi gratis, memang menunjukkan niat baik pemerintah untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, beberapa kebijakan yang diterapkan justru menimbulkan kekhawatiran. Pemangkasan anggaran yang menyasar sektor-sektor vital, misalnya, dapat mempengaruhi kualitas layanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama. Selain itu, kebijakan ekonomi yang terkesan tidak konsisten serta pemberantasan korupsi yang awalnya gencar, kini tampak mulai melemah. Kebijakan yang tidak konsisten, ditambah dengan masalah pengelolaan anggaran yang belum optimal, menambah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam merealisasikan janji-janji kampanye mereka. Terkait dengan target-target ambisius seperti swasembada beras, ekonomi hijau, dan pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 8 persen, kenyataannya ekonomi Indonesia masih stagnan di angka 4-5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dirancang dengan baik, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang diinginkan.

### C. PENUTUP

Penting untuk diingat bahwa dalam organisasi, kesalahan yang terjadi pada akhirnya adalah tanggung jawab pemimpin. Meskipun strategi dan rencana telah dibuat dengan matang, eksekusi adalah tantangan terbesar. Sehebat apa pun visi seorang pemimpin, jika sistem birokrasi dan pelaksanaan kebijakan tidak terkelola dengan baik, maka dana besar yang digelontorkan untuk program-program tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih jauh dari sekadar pidato dan janji-janji, dan mulai mengevaluasi sejauh mana pemerintah dapat mewujudkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Visi besar yang disampaikan oleh Presiden Prabowo memang telah membangkitkan semangat banyak orang.[10] Namun, untuk memastikan bahwa kepemimpinan ini benar-benar membawa perubahan yang diinginkan, perlu ada fokus yang lebih besar pada eksekusi dan efektivitas kebijakan di lapangan. Masyarakat membutuhkan bukti konkret dari kebijakan yang dijanjikan, bukan sekadar retorika yang menggebu-gebu. Pada akhirnya, pemerintah harus bisa menunjukkan komitmen untuk menjalankan janji-janji tersebut dengan integritas dan transparansi, agar perubahan yang dijanjikan tidak hanya menjadi angan-angan belaka, melainkan tercermin dalam perbaikan kondisi sosial dan

ekonomi yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

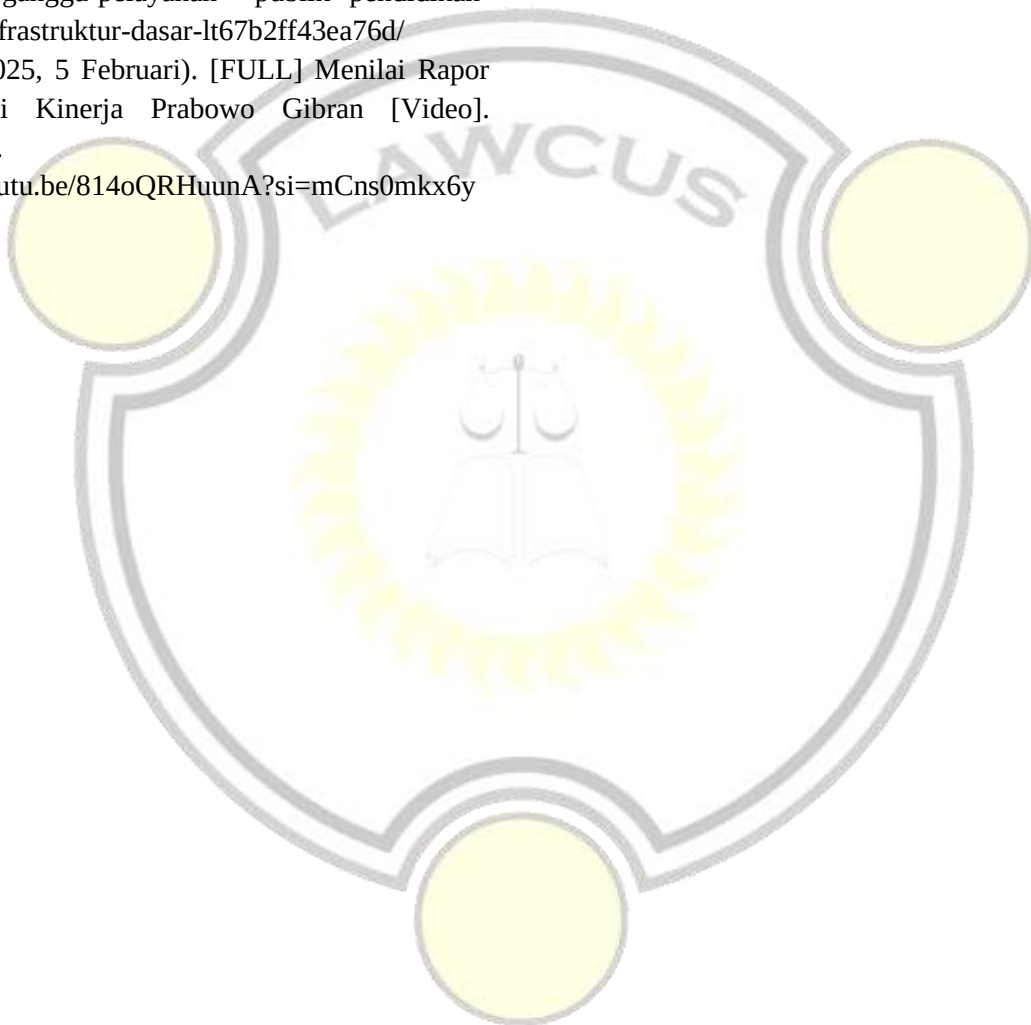
- Attar, H. (2024, 26 Oktober). Kabinet Merah Putih gemuk, bagaimana proses pendanaan dan pengawasannya? NU Online. Diakses pada 4 April 2025, dari <https://www.nu.or.id/nasional/kabinet-merah-putih-gemuk-bagaimana-proses-pendanaan-dan-pengawasannya-1mZCP>
- Grehenson, G. (2025, 31 Januari). Efisiensi anggaran sulit tercapai, pakar UGM sebut pemerintah hadapi perilaku boros dalam birokrasi. Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 4 April 2025, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/efisiensi-anggaran-sulit-tercapai-pakar-ugm-sebut-pemerintah-hadapi-perilaku-boros-dalam-birokrasi/>
- Kristanti, L. (2024, 17 Desember). Prabowo hadir KTT D-8 wakili Indonesia terima keketuaan untuk 2026. Antara News. Diakses pada 4 April 2025, dari <https://www.antaraneews.com/berita/4531870/prabowo-hadiri-ktt-d-8-wakili-indonesia-terima-keketuaan-untuk-2026>
- Luthfia, A. (2025, 5 Januari). Penghapusan kredit macet UMKM, ini tahap dan kriteria yang ditetapkan. Antara News. Diakses pada 4 April 2025, dari <https://www.antaraneews.com/berita/4564570/penghapusan-kredit-macet-umkm-ini-tahap-dan-kriteria-yang-ditetapkan>
- Maharani, T. N. (2025, 19 Februari). Apa yang melatarbelakangi aksi Indonesia Gelap? Ini sederet penyebabnya. Zona Banten. Diakses pada 4 April 2025, dari <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-239079294/apa-yang-melatarbelakangi-aksi-indonesia-gelap-ini-sederet-penyebabnya>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

[10] tvOneNews. (2025, Januari 18). Menilai Rapor 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran [Video]. YouTube. Diakses pada 3 April 2025, dari <https://youtu.be/xaC1yzCqd1A>.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 384.

Rizki, M. J. (2025, 27 Februari). Efisiensi anggaran ganggu pelayanan publik, pendidikan hingga infrastruktur dasar. Hukumonline. Diakses pada 4 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/efisiensi-anggaran-gangu-pelayanan-publik--pendidikan-hingga-infrastruktur-dasar-lt67b2ff43ea76d/>

tvOneNews. (2025, 5 Februari). [FULL] Menilai Rapor 100 Hari Kinerja Prabowo Gibran [Video]. YouTube. <https://youtu.be/814oQRHuunA?si=mCns0mkx6yLhbUtW>



# PROJECT COORDINATOR



## **Director**

"Menjadi lebih, untuk memberi lebih"  
-Fatah Hidayatullah-

## **Vice Director**

"Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Teruslah tumbuh dan persiapkan diri mengejar impian"  
-Rizka Salsabila-



## **Manager Of Writing Skill**

"Kejarlah mimpimu sebelum kamu dipekerjakan untuk mengejar mimpi orang lain"  
-Marissa Afrianti-



## **Vice Manager Of Writing Skill**

"Hidup bukan soal bahagia, hidup selalu soal tanggung jawab. Dan satu-satunya cara buat tetap waras adalah disiplin. Karena disiplin memberi kontrol. Dan kontrol=freedom"  
-Yuli Budiarti-



# BEHIND THE OPERATIONS



## Person In Charge

"Everything you lose is a step you take"

-Saskia Namira Anjani-

## Editor

"If you fail to plan, you plan to fail"

-Indah Denisa Apriani-



## Editor

"DON'T be afraid to fail. Be afraid Not to try"

-Alsya Monica Glaresta-

## Editor

"Kita lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita pikirkan"

-Rayya Tsabita Ameera-



# CREATORS OF CHANGE



**Alsya Monica Glaresta**

"DON'T be afraid to fail. Be afraid Not to try"

**Siti Rohmawati**

"Menulis bukan hanya untuk menyampaikan apa yang kita tahu, tetapi untuk mengeksplorasi apa yang kita belum tahu"



**Zenica Naiza Fariski**

"Manusia tidak dapat menemukan samudra baru kecuali ia memiliki keberanian untuk melupakan pantai" -Andre Gide



# CREATORS OF CHANGE



**Indah Denisa Apriani**

"If you fail to plan, you plan to fail"



**Muhammad Fawzy Abyaz**

"Waktu adalah emas"



**Shalwa Try Huwaidah**

"Intuisi anda tahu apa yang harus ditulis. Hal lain jangan ikut campur"

# CREATORS OF CHANGE



**Dzaky Nesta Rabbani**

"Kemungkinan kecil meraih sesuatu bukan berarti itu nol"

**Nadia Ummi Nabilah**

-Ad Maiora Natus Sum-  
"Aku dilahirkan untuk hal-hal besar"



**Stefany Yemima**

"Lakukan segala pekerjaan dengan kasih"

**April 2025**



**5th Edition!**

# **LAWCUS**

## **Legal Essay Book**

**"Meninjau 100 Hari Kepemimpinan Kabinet Merah Putih dalam Merekonstruksi Indonesia"**

Indonesia memasuki babak baru dengan lahirnya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 100 hari pertama menjadi momen krusial untuk menilai arah kebijakan, realisasi janji kampanye, dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat menuju visi Indonesia Emas 2045.

Lawcus Legal Essay Book berisi kumpulan esai karya anggota Law Intellectual Society (LAWCUS) FH UNSRI. Setiap tulisan menggambarkan ketajaman analisis, refleksi kritis, serta aspirasi terhadap masa depan bangsa.

LAWCUS mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam, menumbuhkan budaya intelektual, dan turut mengawal perjalanan demokrasi Indonesia.

Sebuah kontribusi kecil, untuk langkah besar menuju Indonesia yang adil, maju, dan berkelanjutan.

***OUR SOSIAL MEDIA:***



**lawcusfhunsri**



**Lawcus FH Unsri**



**lawcusfhunsri**



**Law Intellectual Society**